

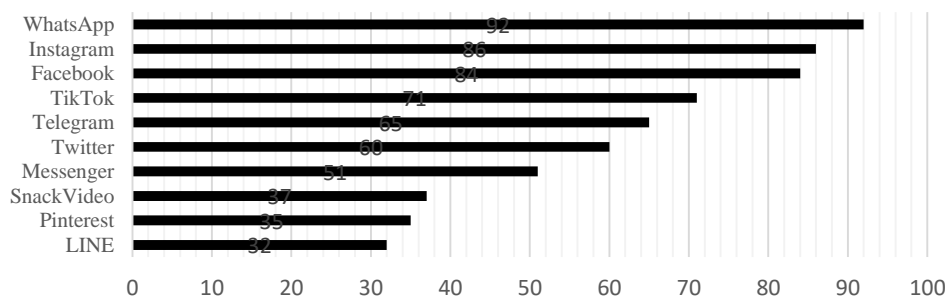
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya memberi dampak yang masif terhadap dunia politik, terlebih lagi mengenai pemikiran, rasional serta arah diskusi komunikasi politik, yang dimana akan terlihat jelas di masa-masa politik. Seperti yang diketahui, media sosial merupakan wadah digital yang memberi peluang sebesar-besarnya bagi penggunaanya guna mengemukakan pendapat maupun pemikirannya, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi (Harahap, 2020:17), sehingga meskipun media konvensional masih awam digunakan dalam berkampanye, wadah digital ini telah dianggap memiliki peran penting dalam memberikan suatu pengaruh atas perilaku masyarakat dalam memilih dan menerima informasi. Tingginya *input* terhadap masyarakat dari media sosial seolah membuka dimensi baru dalam mewarnai pola pertukaran informasi dan diskusi politik konvensional yang ada selama ini.

Gambar 1.1 Presentase Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak 2023, Sumber: (Mustajab, 2023)



Diketahui masyarakat Indonesia paling banyak mengkonsumsi media sosial berbentuk jejaring komunikasi dan berbagi informasi seperti yang disebutkan pada grafik di atas, dimana enam peringkat teratas diduduki oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram dan Twitter. Sifatnya yang umum menjadikan sosial media sangat berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan masa kini, salah satunya dalam politik dan pemilu. Dimana pemilu sendiri ialah momen dimana keterlibatan atau partisipasi masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan guna menentukan kualitas birokrasi. Dikatakan partisipasi sangat penting sebab yang dinamakan partisipasi dalam politik merupakan suatu kenyataan tindakan seseorang baik yang berperan secara langsung maupun langsung dalam kegiatan dan kebijakan negara (Budiarjo, 2008:367). Partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh literasi politiknya, dimana literasi politik dimaknai sebagai pengetahuan atau kesadaran praktis akan konseptual politik yang dapat mencegah seseorang termakan oleh diseminasi ideologi dan politik identitas (Heryanto, 2013:53). Sehingga literasi politik adalah seluruh proses dan tindakan yang dilakukan guna memahami seputar isu politik, kesiapan para aktor politik serta arah kecondongan mereka dalam melakukan persuasi untuk pribadi sendiri bahkan individu lain. Sehingga, literasi politik bersifat sangat penting juga merupakan derajat ukur dari pemahaman, keterampilan dan sikap mterkaitengenai politik.

Melalui jangkauan media sosial yang luas dan cenderung ramah akses, masyarakat dapat saling berbagi informasi satu sama lain (Howard, 2012:359) serta

dapat dijadikan wadah untuk mengekspresikan diri, mendorong inovasi, memperluas relasi, sehingga media sosial kini memegang peranan penting dalam berbagai bidang termasuk sosial dan politik. Penggunaan media sosial dapat dikatakan membuka akses lebih jauh terhadap penyebaran informasi serta sarana komunikasi politik yang marak menjelang tahun pesta demokrasi di 2024 mendatang. Melalui menjamurnya penggunaan media sosial, berbagai jenis informasi terkait dengan visi-misi, rencana kerja dan sebagainya diharapkan dapat dibagikan guna merebut dukungan dari calon simpatisan.

Penyebaran informasi politik melalui media sosial, tentunya sangat berdampak pada partisipasi dari penggunanya, yang mana menurut data yang disediakan APJII tahun 2022, tingkat pengguna internet tertinggi ada pada kelompok usia 13-18 tahun dengan angka hasil fantastis yakni 99,16% dan 19-34 tahun sebanyak 98,64% (Bayu, 2022). Kemudian, bersesuaian survei yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018, disebutkan sebanyak 60,8% dari generasi kelahiran 1995-2005 melakukan akses terhadap berita politik melalui sumber-sumber internet (Setyowati, 2018). Berdasar data tersebut, pengguna terbesar media sosial dapat diperkirakan berada di usia pemilih pemula. Kemudian, disebutkan pula di pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, dimana yang dikatakan dalam kategori pemilih pemula ialah WNI yang berusia 17 tahun atau lebih dan/atau pernah menikah, selanjutnya dipaparkan pada pasal 19 ayat 1 dan 2, bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah WNI yang

didaftar oleh panitia pemilu dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara sudah memenuhi syarat untuk memakai hak suaranya.

Pemilih pemula telah menjadi isu yang hangat dibicarakan menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, terlebih dengan diketahuinya Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dengan adanya lonjakan penduduk usia produktif yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045 nanti. Seiring dengan hal tersebut, maka partisipasi pemilih pemula dalam politik memegang andil yang besar dalam penentuan nasib pemerintahan negara untuk tahun-tahun mendatang. Partisipasi politik tak dibatasi pengambilan bagian atau peran dalam aktivitas politik, juga selalu didahului oleh kelompok kepentingan yang dipengaruhi budaya politik dimana individu dapat menguasai kekayaan politik, serta pimpinan partai politik (Almond, 1978:25). Sehingga dengan didominasinya pemilih oleh generasi muda saat ini, diperlukannya tindakan yang sesuai sebagai antisipasi.

Demi melakukan partisipasi dalam pesta demokrasi, pemilih pemula perlu memiliki wawasan dan kewaspadaan yang baik terhadap politik. Selain guna memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih sebagai tolak ukur demokrasi Indonesia, literasi politik juga dimaksudkan agar berkurangnya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tentunya tidak sejalan dengan demokrasi. Berkaca kembali pada pemilu 2019 dimana hasil pengawasan Banwaslu menemukan sejumlah besar pelanggaran dimulai sejak kampanye sebesar 6.234 yang terdiri atas temuan Banwaslu hingga laporan masyarakat (CNN Indonesia, 2019). Mendorong sebanyak-banyaknya pemilih pemula guna menyumbangkan hak pilihnya dalam

pemilihan umum sehingga peluang kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat ditekan.

Sejak pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2019, daftar pemilih di Kota Malang telah didominasi oleh pemilih pemula dan generasi muda yang berada di kalangan usia 20 sampai 30 tahun, kini jumlah pemilih pemula yang cukup besar ditemukan pula di Kota Malang dengan presentase 21, 79% atau sekitar 142.028 orang dari DPT atau Daftar Pemilu Tetap (KPU Kota Malang, 2023). Angka yang cukup fantastis juga ditemukan pada jumlah pemilih potensial di Kota Malang yang berada diperkirakan 6.066 orang seperti yang dinyatakan oleh Ketua KPU Kota Malang pada tim Radar Malang. Pemilih potensial adalah warga yang diperkirakan menginjak usia 17 tahun menjelang pemilu sehingga mereka turut berhak menyumbang suara dalam pesta demokrasi kelak. Menunjukkan adanya pengaruh yang besar oleh pemilih pemula terhadap kebijakan serta program kerja pemerintah periode mendatang.

Pemilih pemula tersusun atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan kelompok usia muda menjadi segmen menarik yang tentunya memegang signifikansi secara jumlah. Oleh sebab inilah dipilih mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang berjumlah 100 orang sebagai sampel penelitian. Karakteristik umum pemilih pemula yang disebut masih dinamis, cenderung berdasarkan lingkungan serta keadaan lokal dan bebas dari kepentingan-kepentingan politik golongan menyebabkan begitu pentingnya

kewaspadaan serta pemahaman politik guna turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Dalam hal ini seringkali pemilih pemula dinilai sebagai target persuasi yang mudah, sehingga proses penyebaran informasi politik melalui sosial media, yang penggunaannya sebagian besar adalah generasi muda penting dilakukan dengan sehat. Demikian pula dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang sangat berdampak dalam tingkat literasi politik yang dimiliki.

Dominasi pemilih muda dan pemula di era digitalisasi informasi dan komunikasi menjelang praktik pesta demokrasi di Kota Malang merupakan fenomena yang menarik guna diteliti sebab sesuai dengan data dari Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada 2017 yang menyebut dampak dari perkembangan teknologi serta kayanya sumber informasi di media sosial dapat menyediakan ruang bagi pemuda guna mewujudkan pemuda yang peka terhadap politik (Mohammad, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah pada penilitan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh penggunaan sosial media terhadap partisipasi politik pemilih pemula?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan serta menganalisis ada atau tidaknya pengaruh penggunaan sosial media sebagai penggiat literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian berikut diinginkan dapat menambah kontribusi keilmuan dalam program studi Administrasi Publik. Serta diharapkan mampu menjadi tambahan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam konteks general.

b) Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini di kemudian hari diharap untuk menambah pengetahuan peneliti dalam ilmu pelayanan publik guna untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia masyarakat.

c) Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi manfaat bagi instansi yang terkait sebagai bahan pertimbangan, tambahan pandangan serta dapat digunakan guna mendukung kemajuan di kemudian hari.